

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

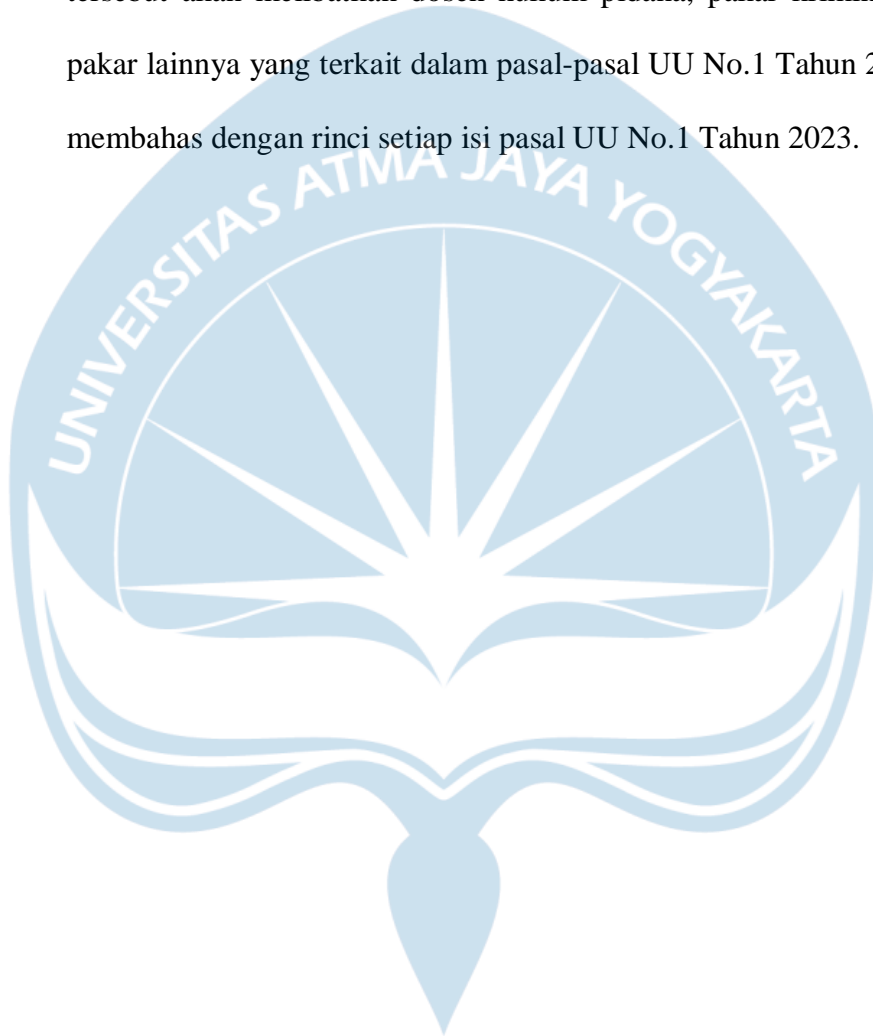
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan terkait dengan analisis pengaturan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara yakni pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk dengan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, dan status Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan agar pasal tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk tetap berdemokrasi dan sekaligus dapat melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat: DPR dapat memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait pengertian kritikan dan perbedaan dengan penyaluran ekspresi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Untuk Masyarakat: masyarakat dalam menyelaraskan pemahaman terhadap pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dapat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dimana sosialisasi tersebut akan melibatkan dosen hukum pidana, pakar kriminologi, dan pakar lainnya yang terkait dalam pasal-pasal UU No.1 Tahun 2023 untuk membahas dengan rinci setiap isi pasal UU No.1 Tahun 2023.



Daftar Pustaka

Buku

- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- A. Widiada Gunakarya S.A., 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta.
- Diana Fawzian, dkk. 2018, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hilman Syahril H., 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten.
- Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Alim, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, LKiS, Yogyakarta.
- Muhammad Sadi dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencan, Jakarta.
- Nadrilun, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Purnama E., 2019, *Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia Imagine Press, Bandung.
- Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat jitu menyelesaikan masalah*, Visi Media, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2021, *Sejarah Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hasil Penelitian

Dian Dombat Pejoreza, 2019, *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Faisal Jamal, 2019, *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)*, Skripsi, Program Sarjan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ivana Eka K. W., 2021, *Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri.

Zaenal Arifin, 2021, *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden PADA RUU KUHP*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang masih tetap berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Jurnal Hukum

Abdul Munib, 2018, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, Nomor 1 Februari 2018, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Muhammadiyah Pamekasan.

Ahmad Bahiej, 2006, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2006, Academia education.

Ajie Ramdan, 2020, "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, Nomor 2 Agustus 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Azwar Annas, Rodliyah, Rina Khairani P., 2021, "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 013-022/PUU-IV/2006”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, Nomor 1 Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Bambang Agus W. S., 2019, “Dinamika Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 15, Nomor 19 April 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945.
- Butje Tampi, 2016, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 9 Agustus 2016, Universitas Sam Ratulangi.
- Dewa Gede Atmadja, 2018, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, Nomor 2 Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- Dhanang Alim M., 2015, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, Nomor 1 Januari-Maret 2015, Universitas Sam Ratulangi.
- Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, 2012, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Jurnal Verleden*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2012, Universitas Airlangga.
- Haposan Siallagan, 2016, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, Nomor 2 Juli 2016, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- Helmalia Cahyani, Intan Nurul F., Julia Elisabeth S., Ferry Irawan, 2022, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, Nomor 2 Maret 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Janpatar Simamora, 2014, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Nomor 3 September 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

- Latipah Nasution, 2020, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, Nomor 3 2020, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lidya Suryani Widayati, 2018, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. 10, Nomor 6 Maret 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sayid Anshar, 2019, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal E-ISSN*, Vol. 2/No-2/November/2019, Soumatera Law Review.
- Siti Halilah dan Muhammad Fakhruurrahman Arif, 2021, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2021, STAI AN-Nadwah Kuala Tungkal.
- Syahrizal Dwi Putra dan Jupriyanto, 2018, “Aplikasi Pengenalan Presiden dan Pahlawan Republik Indonesia Berbasis Android”, *Jurnal Jisamar*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2018, Prodi sistem Informasi, STMIK Jayakarta, Jakarta.
- Tiffani Rimandita, 2022, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, Nomor 2 September 2022, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Wemby Adhiatma S. P., 2020, “Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP”, *Jurnal Pandecta*, Vol.15, Nomor 2 Desember 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Zico Junius F., 2022, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, Nomor 1 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Internet

Alfikri Lubis, Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di
RKUHP, hlm.1,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/10140641/mempersoalkan-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp>, diakses 4 Maret 2023.

Andi Saputra, Catatan Ahli soal Pasal Penghinaan ke Presiden Masuk RUU
KUHP, hlm.1, <https://news.detik.com/berita/d-5597362/catatan-ahli-soal-pasal-penghinaan-ke-presiden-masuk-ruu-kuhp>, diakses 5 Maret 2023.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden
dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat
Beradab, hlm.1, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab>, diakses 26 Oktober
2022.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 3 Langkah Kemenkuham Untuk
Menyosialisasikan KUHP Baru, hlm.1, <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/3-langkah-kemenkumham-untuk-menyosialisasikan-kuhp-baru>,
diakses 24 Maret 2023.

Fitria Chusna F, Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan
Tak Akan Dihapus, hlm.1,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/18461691/seputar-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-yang-dipastikan-tak-akan-dihapus>, diakses
26 Oktober 2022.

Indira Ardanaeswari, Cara Rezim SBY Perlakukan Para Penghina Presiden,
hlm.1, <https://tirto.id/cara-rezim-sby-perlakukan-para-penghina-presiden-dTIZ>, diakses 28 Februari 2023.

Matius Alfons, Pro-Kontra Anggota DPR soal Pidana bagi Penghina Presiden di RUU KUHP, hlm.1, <https://news.detik.com/berita/d-5599068/pro-kontra-anggota-dpr-soal-pidana-bagi-penghina-presiden-di-ruu-kuhp>, diakses 26 Oktober 2022.

Nawir Arsyad Akbar, Dampak KUHP Baru Terhadap Revisi UU ITE, hlm.1, <https://news.republika.co.id/berita/rq2bca409/dampak-kuhp-baru-terhadap-revisi-uu-ite>, diakses 13 April 2023.

Rofiqi Hasan, Bakar Foto Presiden Yudhoyono Dipenjara 6 Bulan, hlm.1, <https://nasional.tempo.co/read/62313/bakar-foto-presiden-yudhoyono-dipenjara-6-bulan>, diakses 28 Februari 2023.

Sri Pujianti, Mempertanyakan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah, hlm.1, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18849>, diakses 13 April 2023.

Tatang Guritno, Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangnya Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi, hlm.1, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/21254451/ahli-hukum-pidana-apresiasi-pengesahan-rkuhp-tapi-sayangkan-pasal-penghinaan>, diakses 5 maret 2023

